

PEKERJA, PENGUSAHA, DAN PENGUASA: STUDI TENTANG GERAKAN BURUH DI MEDAN 1994

Oleh: Zaiyardam Zubir

Latar Belakang

Masalah buruh merupakan salah satu persoalan yang mendasar dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini. Salah satu senjata yang seringkali digunakan buruh untuk mencapai tuntutan mereka adalah pemogokan kerja. Selain itu, cara-cara lain yang juga lazim ditempuh adalah demonstrasi, kerusuhan, dan bahkan sampai pemberontakan.

Dalam perkembangan gerakan buruh dewasa ini, gerakan ini dapat membawa dampak yang luas terhadap jalannya pembangunan Indonesia. *Generalized System of Preferences (GSP)* misalnya, merupakan negara maju yang memberikan fasilitas kepada Indonesia, seperti produk ekspor dan bea masuk, sering menyoroti masalah buruh di Indonesia. *International Confederation of Free Trade Union (ICFTU)* dalam sidang tahunannya menyoroti pemogokan buruh PT Gajah Tunggal dan mengancam akan mengajukan petisi kepada pemerintah Amerika Serikat supaya mencabut GSP yang diberikan kepada Indonesia (*The Asian Wall Street Journal*, Mei 1991).

Begitu kompleksnya persoalan buruh Indonesia, maka organisasi buruh se-dunia melalui *International Labour Organization (ILO)* mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak asasi buruh. Dunia seringkali mengecam pemerintah Indonesia, terutama melalui peraturan-peraturan telah memberangus hak-hak pekerja (*The Asian Wall Street Journal*, Mei 1994). Dalam konteks inilah dibahas gerakan buruh di Medan, yang mencapai puncaknya pada bulan Maret, April, dan Mei 1995.

Studi ini akan mencoba membahas berbagai aspek dalam kehidupan buruh, seperti sosial, ekonomi, politik, demonstrasi, keresahan pemogokan, dan pemberontakan buruh. Hal ini bertitik tolak dari berbagai persoalan yang dihadapi buruh. Fraser merumuskan persoalan buruh, yaitu upah, jaminan sosial, perilaku penugasan yang kurang sesuai dengan kemampuan pribadi, daya kerja, dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang diemban, adanya masalah pribadi, kesepakatan kerja, syarat kerja, dan hal politik pekerja (Fraser, 1992: 59).

Perumusan Masalah

Persoalan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah kehidupan buruh yang bekerja di berbagai industri di Medan dan sekitarnya dari tahun 1970-1995. Walaupun demikian, studi lebih diarahkan pada gerakan-gerakan

buruh, seperti demonstrasi besar-besaran yang terjadi bulan April 1994. Untuk memperjelas rumusan permasalahan, maka diperinci dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab gerakan buruh di Medan.
- b. Bagaimana bentuk gerakan buruh itu.
- c. Bagaimana kebijakan pengusaha untuk mengatasi gerakan buruh.
- d. Apa kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi gerakan buruh.

Tinjauan Teoretis dan Metode Penelitian

Studi tentang buruh pabrik belumlah banyak mendapat perhatian dari sejarahwan. Bidang yang banyak diteliti oleh sejarahwan adalah petani dan buruh perkebunan. Salah satu karya terpenting adalah buah karya Sartono Kartodirdjo. Melalui disertasinya yang monumental, "The Peasants' Revolt Banten in 1888, Its Conditions, Cause, and Sequel: A Case Study of Social Movement in Indonesia", ia berusaha menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Gerakan petani di Banten ini tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah Belanda dalam kehidupan masyarakat. Untuk menguasai Banten, pemerintah Belanda menerapkan sistem birokrasi yang legal rasional, sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Kondisi ini tidak dapat diterima oleh elite masyarakat, sehingga mereka berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda.

Untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kajian tentang buruh lebih dititikberatkan pada zaman kolonial Belanda. Jan Breman misalnya, melalui bukunya *Koelie, Planters en Kooloniale Politiek*, mencoba menyoroti kehidupan buruh di Medan pada masa perkebunan-perkebunan besar. "De Millioen uit Deli" atau Sejuta Masalah dari Deli", sebagai salah satu bab dari bukunya itu menggambarkan berbagai persoalan yang dihadapi buruh kontrak yang bekerja di deli. Mereka hidup dalam sebuah siklus penderitaan, yang dengan sengaja diciptakan oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan. Kolusi kedua kelompok ini kemudian menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan buruh.

Karya lainnya dari kehidupan buruh zaman kolonial adalah Moehammad Said melalui bukunya *Koeli Kontrak Tempo Doeloe: Di antara Derita dan Kemarahannya*. Moehammad Said dalam karyanya ini mencoba menggambarkan derita yang dijalani oleh buruh-buruh kontrak yang bekerja di Medan. Kerjasama yang dilakukan oleh bangsawan-bangsawan, pemilik modal, dan pemerintah Hindia memberikan janji-janji manis terhadap buruh. Sumatra Timur, Negeri Impian Gulden, merupakan semboyan-semboyan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menarik buruh ke Medan. Kenyataan yang mereka terima adalah mereka hidup dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, karena terjadinya kolusi antara pemilik modal, raja-raja, dan pemerintah Belanda.

Walaupun telah banyak studi tentang buruh di Medan, namun karya-

karya sejarawan tentang kehidupan buruh di Medan yang bersifat kontemporer belumlah banyak yang diteliti. Kehidupan buruh pabrik zaman orde baru misalnya, merupakan studi yang sangat menarik ditinjau dari sejarah sosial. Kasus seperti "April Kelabu 1994" yang lalu, tepatnya kerusuhan buruh di Medan, 14 April 1994 yang lalu merupakan salah satu bentuk kajian yang sangat menarik, terutama melihat berbagai fenomena dari kehidupan buruh di Medan dewasa ini.

Membicarakan masalah buruh sebagai kajian sejarah, maka pendekatan akan berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Sosiologi diharapkan akan mampu memberikan gambaran kehidupan sosial buruh dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, sedangkan ilmu ekonomi diharapkan akan mampu memberikan gambaran kehidupan buruh, terutama masalah upah, kesejahteraan, perlakuan, dan hak politik buruh.

Dalam penelitian sejarah sebagai suatu proses, bukan berarti tidak terdapatnya suatu event/peristiwa di dalamnya. Untuk membahas suatu peristiwa dalam suatu periode tertentu sebagai batasan penulisan, maka berbagai peristiwa yang dianggap penting di dalamnya dapat dianggap sebagai suatu hal penting untuk dikemukakan. Misalnya dalam periode penelitian ini, maka kurun waktu 1970-1995 akan dapat dilihat berbagai hal penting, seperti kebijakan ekonomi oleh pemerintah dan penguasa yang akan melahirkan tipe-tipe buruh-buruh, seperti buruh pabrik sejak tahun 1970-an di Medan dan sekitarnya. Puncak dari gerakan buruh adalah pemogokan bulan April dan Mei 1994 itu.

Keresahan di kalangan buruh sering menjurus pada konflik. Konflik ini pada tahap tertentu merupakan protes terhadap perusahaan, namun dapat juga menjurus pada tindakan kekerasan di kalangan buruh. Gerakan buruh yang berbentuk konflik sebagai cara penyelesaian yang bersifat kekerasan dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, seperti kerusuhan, konflik, pemberontakan, kudeta, dan perang saudara. Robert Gurr merumuskan bentuk gerakan-gerakan yang bercorak kekerasan ini atas beberapa tingkatan, yaitu:

1. Turmoil, yaitu tindakan kekerasan politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi populer, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik, dan pemberontakan kedaerahan yang relatif spontan.
2. Konspirasi, yaitu kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas termasuk pembunuhan politis yang terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta, dan pemberontakan.
3. Perang Internal, yaitu kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak negara, kekerasan yang ekstensif, termasuk terorisme, perang gerilya dalam skala besar, seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi (Gurr, 1971: 11).

Dalam konteks inilah akan dilihat gerakan-gerakan buruh yang terjadi

di Medan. Dari gerakan buruh, seperti mogok kerja akan diterangkan sebab-akibat dari gerakan buruh, yang menurut Dahrendorf (1986: 15) akan dapat dipakai dalam menganalisis fenomena sosial.

Bertitik tolak dari keresahan-keresahan yang muncul, pada tahap awal biasanya dimulai dari ketidakpuasan yang berkembang di kalangan buruh. Ketidakpuasan seperti ini menjadi pemicu untuk mengadakan serangkaian aksi. Secara teoretis, Robert Gurr menggambarkan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Satu sisi ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemauan. Nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya. Nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan. Kesenjangan antara nilai harapan dengan kenyataan mempercepat proses terjadi tindakan kekerasan dan pemberontakan di kalangan buruh.

Selama berlangsungnya konflik, pusat perhatian juga harus ditujukan kepada elite-elite yang terdapat dalam kelompok itu. Keberadaan seorang elite amat penting, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan pemikir dari setiap gerakan sosial (Kartodirdjo, 1984: 26-33).

Hal lain yang juga penting untuk dibahas adalah pola hubungan antara buruh dengan perusahaan. Perusahaan memang merupakan badan usaha milik negara, namun dalam kenyataannya tidak. Pola hubungan yang terbentuk antara buruh dengan majikan adalah tidak tertutupnya kemungkinan pimpinan berlaku sebagai seorang raja kecil pada perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai seorang raja, ia juga minta disembah oleh buruhnya dan semua perkataannya menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh buruh.

Dalam konteks ini, bahasan yang menarik adalah bentuk perlakuan yang diterima buruh dari perusahaan dan pola-pola hubungan yang diterapkan terhadap buruh. Pola hubungan antara pimpinan sebagai majikan dengan buruh tambang sebagai bawahan telah membentuk suatu pola hubungan seperti patron dengan *client* (Scott, 1983: 20-50).

Segi lain dalam penulisan sejarah adalah masalah metode penulisan. Sebagai sebuah penulisan sejarah, maka diperlukan beberapa langkah atau metode untuk merekonstruksi masa lalu ataupun objek yang akan diteliti. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Ibnu Khaldun (1982) merumuskan langkah-langkah itu sebagai berikut: Pertama, sumber yang diperoleh harus melalui observasi. Kedua, telaah khusus terhadap sumber-sumber yang ada. Ketiga, pengujian terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari observasi. Keempat, penulisan sejarah, yang dibagi atas beberapa pasal dan setiap pasal membicarakan peristiwa, sejauh peristiwa itu menyangkut penulisan. Terakhir, menulis secara mendetail dan memperhatikan titik hubungan dari setiap peristiwa.

Pembahasan

Medan merupakan kota yang telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Kota yang pernah mendapat julukan "tanah impian, tanah dolar" (Pelzer, 1985) ini memang telah menarik minat masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah itu. Opini seperti ini masih berkembang sampai masa sekarang ini. Hal ini disebabkan kota Medan merupakan kota yang terbuka dan sangat heterogen dalam komposisi penduduknya.

Dalam perkembangannya, pemukiman etnis lain di Medan cenderung ke arah pembentukan kampung berdasarkan etnis dan ras. Beberapa wilayah didiami berdasarkan etnis, seperti Tuntungan sebagai wilayah etnis Karo, Kota Maksom sebagai wilayah etnis Minangkabau, Kampung Besar sebagai wilayah etnis Melayu, dan Kampung Keling yang didiami etnis India. Pusat-pusat kota dan pusat pertokoan didominasi oleh keturunan Cina. Orang Batak mendiami Helvetia dan Mandala. Orang Jawa mendiami Tanjung Selamat. Usman Pelly (1986) menyebutkan bahwa kampung-kampung ini merupakan "kapsul-kapsul" yang mengelilingi pusat kota, dan berfungsi sebagai arena penguatan kesetiaan primordial (bahasa, adat, agama, dan kebiasaan etnis).

Pemetaan wilayah ini juga diikuti oleh kondisi sosial etnisnya. Pada umumnya, penduduk pribumi hidup di daerah kantong-kantong kemiskinan. Walaupun demikian, mereka ada juga yang hidup makmur, namun jumlahnya relatif sedikit. Biasanya, kelompok ini adalah para pejabat pemerintah ataupun swasta.

Hal yang sangat menyolok adalah perbedaan antara penduduk pribumi dan penduduk Cina. Secara ekonomi, penduduk Cina merupakan warga 'kelas satu' di kota Medan. Mereka menguasai pusat-pusat perdagangan di seluruh kota Medan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hampir 90% dari supermarket-supermarket dan pusat perdagangan yang tersebar di kota Medan adalah milik keturunan Cina.

Perbedaan ini telah berjalan sejak zaman kolonial Belanda. Hanya saja, sejak orde baru berjalan di Indonesia, perbedaan ini semakin tajam. Kesempatan ekonomi yang luas, karena memiliki modal yang besar dan kolusi yang dilakukan oleh keturunan Cina mengakibatkan mereka berada pada posisi yang sangat kuat dalam bidang ekonomi, dan menguasai sektor-sektor penting, seperti perdagangan.

Hal ini akan memperlihatkan perbedaan tajam lain di pusat kawasan industri. Pada pusat-pusat industri, penduduk pribumi umumnya adalah buruh-buruh, sedangkan pemiliknya orang Cina. Perbedaan ini diikuti oleh masalah kesejahteraan dan masalah hak-hak asasi buruh. Tidaklah heran misalnya, salah satu masalah yang sangat krusial di Indonesia dewasa ini adalah masalah buruh. Kebijakan ekonomi yang berlaku di republik ini tidaklah mendukung posisi buruh, misalnya masalah upah. Gejolak buruh di Medan juga berawal dari persoalan ini. Majalah *Forum* melaporkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) hanya didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KMF), berarti mengabaikan kebutuhan buruh akan tempat tinggal

dan kebutuhan sosial serta kebutuhan rohaninya. Upah Minimum Regional (UMR) hanya Rp 3100/ hari, itu pun tidak dibayar sepenuhnya oleh pengusaha. Masih banyak di antara 381.000 buruh yang bekerja di 7.936 perusahaan di wilayah ini yang menerima upah hanya antara Rp 1.600 sampai Rp 2.400 per hari (*Forum*, Desember 1994).

Kesewenang-wenangan terhadap buruh juga terjadi terhadap hak-hak normatifnya. Hak yang seharusnya diterima buruh seringkali dilupakan dan bahkan dipreteli oleh pengusaha. Contohnya, jaminan kesehatan, kehamilan, dan buruh di bawah umur. Ketimpangan antara kesempatan dengan jumlah pekerja sering dimanfaatkan pengusaha untuk menekan buruh. Tidak ganjil bila ada karyawan yang vokal menuntut hak-haknya, dapat dengan mudah di-PHK sebagai penghalus kata dipecat. Atau, si karyawan digeser kedudukannya ke status yang lebih rendah, sehingga akhirnya lebih terhormat untuk mengundurkan diri. Keluarnya seorang pekerja tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan, karena "pergi satu, akan datang seribu pengganti" (*Forum*, Desember 1994).

Kondisi ini sesungguhnya disebabkan oleh kelompok yang seharusnya melindungi buruh tidak berperan. Depnaker misalnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengadakan kolusi dengan pengusaha, sehingga buruh kehilangan tempat mengadu. Begitu juga SPSI, organisasi buruh di bawah bendera pemerintah. SPSI ini tidak dapat memperjuangkan nasib buruh, karena mereka tidaklah otonom. Mereka lebih banyak ditentukan oleh keinginan pengusaha dan penguasa (*Tempo*, Mei 1994).

Kondisi ini diperburuk oleh pengusaha menggunakan preman dan pihak keamanan untuk menganiaya buruh. Yang jelas, kolusi antara pengusaha, penguasa, dan preman di Sumut sudah mengakar. Petugas Depnaker bersedia membuat laporan fiktif tentang kondisi suatu perusahaan, setelah menerima suap dari pengusaha. Pengusaha juga berani melanggar peraturan perburuhan, karena dibeking pihak aparat yang berwenang (*Forum*, Desember 1994).

Dalam kondisi seperti itulah buruh menjalani kehidupan sehari-hari. Tatkala ada kekuatan dari luar yang mempengaruhi mereka, maka ledakan pun tidak dapat dielakkan. Sepanjang orde baru, ledakan-ledakan yang ditujukan buruh kepada pengusaha, terutama pengusaha keturunan Cina, terjadi pada tahun 70-an dan 80-an. Aksi yang mereka lakukan adalah membakar toko-toko dan rumah-rumah penduduk Cina itu. Ledakan yang besar dari gerakan buruh di Medan yang ditujukan terhadap kelompok penduduk keturunan Cina ini terjadi pada Maret dan April 1994 dan mencapai puncaknya 14 April 1994.

Sejak Maret, suasana kota Medan memang sudah tidak nyaman. Menjelang puasa, buruh mulai melancarkan gerakan untuk menuntut tunjangan lebaran. Namun, karena sikap angkuh dari pengusaha dan arogansi pihak keamanan, maka tuntutan buruh itu dilecehkan. Sampai menjelang lebaran, buruh mulai bergerak secara massal. Pada 12 Maret, sebanyak 5000

orang buruh mendatangi DPRD Sumatra Utara untuk menuntut tunjangan lebaran (*Harian Waspada*, 13 Maret 1994).

Dalam penyelesaian ciri khas Medan, maka kolusi antara pengusaha dengan penguasa serta didukung oleh pihak keamanan dan preman menentukan kebijakan. Tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka menjelang april mobilisasi buruh semakin gencar dilakukan oleh berbagai organisasi yang memperhatikan nasib buruh. Puncaknya adalah tragedi April yang berdarah itu. SBSI mengeluarkan pernyataan bahwa mogok sebagai pilihan terakhir menyalurkan kekecewaan yang menumpuk.

Kerusuhan yang terjadi April 1994 itu sudah di luar kendali nurani manusia. Massa yang sudah menderita selama ini seolah-olah melampiaskan nafsu angkara murka atas ketidakadilan yang diterimanya. Dengan buas mereka mengubar nafsu amarah terhadap kelompok yang tidak mereka senangi. *Harian Republika* (21 April 1994) melaporkan, bahwa amarah seolah membakar Medan. Iring-iringan manusia bergerak secara beringas. Batu-batu melayang, jendela-jendela kaca luluh lantak, mobil dan motor dijungkirkan. Setidaknya, 150 ruko dan kantor-kantor rusak. Belasan kendaraan ringsek. Sejumlah orang cedera dan ada pula yang tewas dihabisi tangan-tangan massa. Salah seorang yang tewas adalah Jully Kristanto alias Kwok Joe Lip, seorang pengusaha keturunan Cina (*Tempo*, 30 April 1994).

Beberapa perusahaan yang didemonstran buruh adalah perusahaan milik keturunan Cina. Pada saatnya, gerakan yang muncul menjurus pada gerakan anti Cina (Human Rights Watch/ Asia, 1994). Perusahaan-perusahaan milik pengusaha Cina, seperti PT Cipta Rimba Djaya, PT Gunung Gahapi Sakti, PT Native Prima, PT Industri Karet Deli, dan PT Gandu Utama Seribu merupakan asal demonstran bekerja. *The Workers Rally in Medan* (apel besar buruh di Medan) mencapai puncaknya pada 15 April 1994 ditandai dengan 20.000 buruh turun ke jalan-jalan di kota Medan, dengan sasaran utama adalah perusakan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh warga keturunan Cina.

Dalam gerakan buruh di Medan, sesungguhnya telah melibatkan banyak pihak. Sebagai kelompok yang turun ke jalan, buruh tidak berdiri sendiri. Banyak kelompok dan kepentingan yang bermain di dalamnya. Mobilisasi massa dilakukan oleh berbagai LSM. SBSI merupakan salah satu LSM yang memobilisasi buruh secara aktif di Medan. Bahkan, Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan menjadi salah seorang tersangka utama dalam gerakan itu. Selain Muchtar, tokoh lokal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, seperti Amosi Telaumbanua dari kepala SBSI cabang Medan, Maiyasak Johan dari Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAIY), Janes Hutapea dari Yayasan Pondok Rakyat Kreatif, Parlin Hutauruk dari Yayasan Kelompok Pelita Sejahtera dan tokoh langsung dari kalangan buruh sendiri yaitu Ridwan Lubis, merupakan tokoh-tokoh penting yang menggerakkan buruh untuk melakukan demonstrasi di Medan pertengahan Maret, April, dan Mei 1994 (*The Limit Openness, Human Rights Indonesia and East Timor*, 1994).

Setelah berakhirnya peristiwa, tokoh-tokoh buruh itu banyak yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Berbagai hukuman dijatuhkan kepada mereka. Muchtar Pakpahan bahkan jadi tersangka utama dari tokoh yang memobilisasi demonstrasi buruh di Medan (Republika, 15 Juni 1994). Bahkan perkara Muchtar Pakpahan, sebagai salah seorang tokoh penting buruh menjadi ajag polemik di tingkat pusat, Contohnya, Hakim Agung Adi Anjoyo memutuskan bebas perkara Muchtar Pakpahan, namun Ketua MA Prawoto tetap menghukum Muchtar Pakpahan. Akibatnya, Adi Anjoyo terlempar dari lembaga keadilan yang katanya amat terhormat dan dihormati itu.

Kesimpulan

Setelah membahas panjang lebar gerakan buruh di Medan, dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok dari gerakan buruh ini adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu berpangkal dari masalah kesejahteraan buruh. Dampak yang ditimbulkan dari keresahan buruh inilah yang seringkali diluar jangkauan akal sehat manusia.

Ketidakpuasan buruh dilampiaskan dengan berbagai tindakan, seperti mogok, demonstrasi, dan kerusuhan; pembakaran dan pembunuhan. Gerakan-gerakan ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga pemilik modal dan pemerintah. Perusakan-perusakan akibat kerusuhan yang diderita pengusaha dan sorotan tajam dari dunia luar terhadap penguasa merupakan salah satu dampak negatif dari gerakan buruh itu.

Kejadian-kejadian di kota Medan memperlihatkan sisi buruk dari kesenjangan sosial dari kondisi kesejahteraan buruh. Demontran besar-besaran yang dilakukan buruh menghentikan roda ekonomi kota Medan dan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak, seperti di kalangan buruh, pengusaha, dan penguasa.

Hal yang menarik dari penyelesaian demonstrasi buruh di Medan adalah aparat keamanan tidak menurunkan tangan besinya. Walaupun kota Medan dijaga penuh oleh pasukan dan tank-tank tempur, namun mereka melakukan persuasif dengan pihak buruh. Pendekatan ini agak berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh penguasa dalam menyelesaikan setiap demonstrasi ataupun kerusuhan, yang biasanya dengan kekerasan. Di Medan, pihak keamanan justru menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, sehingga korban jiwa manusia dapat dihindari.

Pada gilirannya, untuk menghindari malapetaka ini, beberapa langkah haruslah ditempuh, terutama oleh pihak pengusaha dan penguasa, yaitu:

1. Janganlah memperlakukan buruh sebagai sapi perahan. Bagaimana juga, ia juga manusia yang memiliki nurani dan hati.
2. Dalam pembayaran upah, konsep dasarnya bukan lagi sekedar membayar buruh sebelum kering keringatnya. Lebih jauh lagi adalah memberikan sebagian keuntungan perusahaan kepada buruh, sehingga buruh merasa memiliki perusahaan karena perhatian yang diberikan pengusaha.

3. Dalam pertikaian antara pekerja dengan pengusaha, maka penguasa haruslah melihat dari persoalan dasar. Penguasa boleh saja melakukan pemihakan, tetapi pemihakan terhadap kelompok yang tertindas.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-Buku

- Abdullah, Taufik (ed.). 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Jakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Alfian (et. al.). 1986. *Kemiskinan Struktural*. Jakarta: YISS.
- Bremen, J. Koelies. 1992. *Planters en Koloniaele Politiek*. Leiden: KITLV.
- Dahrendoft, Raph. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Darajotun, K. Jakti. 1987. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Depart. Tenaga Kerja RI. 1995. *Rekapitulasi Data Pemogokan 1980-1990*. Jakarta.
- Freser, T. M.. 1992. *Stres dan Kepuasan Kerja*. Jakarta: Pustaka Preesindo.
- Guur, Robert. 1971. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University.
- Kanwil Depnaker Sumut. 1980-1995. *Rekapitulasi Data Pemogokan Buruh Medan*.
- Loekman, Sutrisno, et.al.. 1997. *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta.
- Olsen, Marvin E.. 1986. *The Proses of Social Organization*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Pelly, Usman. 1986. *Menciptakan Pra Kondisi Kesrasian Hidup dalam Masyarakat Majemuk: Kasus Kasus Kotamadia Medan*. Medan.
- Sartono, Kartodirdjo. 1984. *Pemberontakan Petani di Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Scott, James. 1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensinya di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

B. Surat Kabar dan Majalah

- Majalah *Forum*, April, Mei, dan Desember 1994.
- Majalah *Tempo*, April 1994.
- Majalah *The Asian Wall Street Journal*, Mei 1991 dan Mei 1994.
- Surat Kabar *Kompas*, April dan Mei 1994.
- Surat Kabar *Republika*, April dan Mei 1994.
- Surat Kabar *Waspada*, April dan Mei 1994.